

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2010). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Bambang Purnomo. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Djoko Prokoso. (1984). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Leden Marpaung. (1991). *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sudarajat. (2013). *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim H. S. (2004). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, R.M. (2004). *Penuntutan dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. DOKUMEN KAMUS DAN JURNAL

Danang Triwibowo, “Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Kejaksaan Negeri Sragen”, *Jurnal Hukum Pidana*, 2021.

Danur Ahlul Ufresti Roes Praptyanti “Dampak Pertambangan Tanpa Izin (PETI) terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan” , *Jurnal Sivitas Akademia*, April, 2019.

Hundriyah Mundzir, “Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law”, *Prosiding SENTIA. Politeknik Malang*. Vol 18. 2013.

Josua Hutapea, “Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 2 April, 2017.

Semuel Risal, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman”, Jurnal Administratif Reform. Vol 1. No 3.2013.

Suryani BB, “*Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinagea Kabupaten Konawe Selatan*”, Jurnal Publicuho, Vol.2/No.1/April/2019.

D. WEBSITE

<https://agricola-nb.com/category/artikel>. Diakses pada 02 Juli 2022.

<https://tribratanews.aceh.polri.go.id/2022/06/28/polisi-kembali-ungkap-kasus-illegal-mining-satu-ekskavator-ikut-disita/>. Diakses pada 12 Juli 2022.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>. Diakses pada 19 November 2022.

